

Jejak Artikel:

Unggah: 8 Juli 2023;

Revisi: 9 Juli 2023;

Diterima: 12 Juli 2023;

Tersedia Online: 10 Desember 2023

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate*

Venny Carolina¹, Poniman²

¹²Universitas Putera Batam

pb190810050@upbatam.ac.id, poniman@puterabatam.ac.id

There are still numerous businesses in Indonesia that engage in tax avoidance and avoidance practices, including companies whose business activities cross countries. Taxes avoided and evaded by companies can increase wealth for company owners but cost the government money in the end. Companies may engage in tax evasion strategies since doing so is not illegal. The existence of good governance in a company can influence tax planning is the process of formulating organizational strategies to reduce a business' tax liability in a way that complies with applicable laws and regulations. The purpose of forming research is useful in interpreting how there is a relationship that exists between tax avoidance compared to institutional ownership, audit quality, and a truly independent board of commissioners. The sample includes all companies that can be traded on the Indonesia Stock Exchange operating in the property and real estate industry, which are between 2018 and 2022. This study employed a purposive sampling technique and discovered 13 companies to be suitable. The SPSS version 26 application was used to analyze annual reports from entity in the Indonesia Stock Exchange-listed property and real estate industry. The findings suggest that Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, and Audit Quality all have a considerable negative impact on Tax Avoidance.

Keywords: *Audit Quality, Independent Commissioners, Institutional Ownership, Real estate, Tax Avoidance*

Pendahuluan

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam wawancaranya menekankan bahwa sampai saat ini bagian pajak menjadi pemasukan yang paling tinggi untuk negara yaitu sekitar 62,3%. Hal yang membuat Indonesia sangat memperhatikan pajak yaitu karena masih rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Indonesia masih di angka 11% dalam melaksanakan pembayaran iuran pajak dari keseluruhan masyarakat yang diwajibkan membayar ajak pajak. Nyatanya kekurangan tersebut berbeda sedikit dengan apa yang telah ditargetkan oleh APBN-P dengan jumlah Rp 296,7 triliun yang setara dengan PDB 2,35%. Pelaksanaan belanja negara yang terbilang sangat tinggi ini menyebabkan kurangnya anggaran yang disetujui menjadi lebih besar karena jauh dari penerimaan negara yang telah ditargetkan. Sepanjang tahun 2016, penerimaan perpajakan yang terealisasi mencapai Rp 1.283,6 triliun.

¹Coressponden: Venny Carolina. Universitas Putera Batam. Jl. Raden Patah No.12A, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Pb190810050@upbatam.ac.id

Fakta yang terjadi dilapangan pada akhir tahun 2020 mengintrepretasikan bahwa pendapatan pajak masih belum maksimal seperti mengacu atas tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain pendapatan yang disetujui masih cukup jauh dari ketentuan target yang telah ditetapkan. Direktorat Jendral Pajak menyatakan target pajak pada akhir tahun 2020 adalah Rp 1.198,82 triliun, namun penerimaan pajak yang terealisasi hanya Rp 1.069,98 triliun atau dengan skor 89,25% dari target yang ditentukan APBN.

Berbeda dengan penerimaan pajak periode 2021, Direktorat Jenderal Pajak telah dapat merealisasikan target penerimaan pajak yang mana pada tanggal 26 desember 2021 realisasi penerimaan pajak neto adalah dengan skor Rp 1.277,53 triliun atau 103,9% dari target yang ditetapkan APBN dengan skor Rp 1.229,58 triliun. Pada APBN 2021, ditargetkan penerimaan pajak yang lebih besar 14,7% dari tahun 2020 yaitu dengan skor Rp 1.229,58 triliun dengan rincian antara lain target PPh, PPnBM, dan PPN adalah Rp 638 triliun, masing-masing 15,1% lebih tinggi dari realisasi 2020, dan Rp 518,5 triliun, 15,1% lebih tinggi dari realisasi 2020. Akibatnya, pendapatan pajak akan mencapai 44, atau 7%, dari seluruh APBN untuk tahun 2021.

Berikut ini merupakan tabel dari realisasi yang mengacu atas penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia periode 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Tingkat Pencapaian
2018	Rp 1.424 Triliun	Rp 1.315,51 Triliun	92,2%
2019	Rp 1.577,56 Triliun	Rp 1.332,06 Triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,82 Triliun	Rp 1,069,98 Triliun	89,3%
2021	Rp 1.229,58 Triliun	Rp 1.277,53 Triliun	103,9%
2022	Rp 1.484,96 Triliun	Rp 1.716,76 Triliun	115,6%

Sumber: www.pajak.go.id

Kepentingan untuk membayar pajak ini didasari oleh suatu hal yang saling bertolak belakang antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah memiliki keinginan untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin sebagaimana semestinya, lain halnya perusahaan memiliki keinginan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan seminimal atau serendah mungkin. Hal ini yang menjadi sebab awal perusahaan mencari cara baik dengan cara yang legal dan juga ilegal untuk menghindari ataupun meminimalisir beban pajak yang ada.

Untuk mengurangi kewajibannya, wajib pajak dapat melakukan strategi penghindaran pajak, seperti memanfaatkan celah atau kelemahan dalam ketentuan pajak suatu negara yang memungkinkan mereka melakukannya dengan tetap mematuhi undang-undang (Sari & Kinasih, 2021). Adanya kegiatan *tax avoidance* berakibat buruk bagi penerimaan negara yang mana akan menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan diperbolehkan. Hal ini yang menyebabkan *tax avoidance* menjadi suatu hal yang cukup rumit.

Dikarenakan adanya peluang atau kesempatan yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan tertentu untuk melakukan *tax avoidance*, dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip GCG (*strong Corporate Governance*) yang akan mencegah masalah penggelapan pajak di dalam organisasi, merupakan tata kelola perusahaan yang kuat (Kartana & Wulandari, 2018).

Tata kelola perusahaan ini mulai dikemukakan di Indonesia mengacu atas tahun 1998 tepatnya pada saat terjadinya krisis berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lemahnya tata kelola yang diterapkan pada suatu perusahaan mengakibatkan proses perbaikan di Indonesia pada saat itu memakan waktu yang dapat dikatakan cukup memakan waktu. Adanya tata kelola pada suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh atas penentuan kebijakan agar

melaksanakan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Riset ini memakai alat ukur Dewan Komisaris Independen, Kepemimpinan Instiusional dan Kualitas Audit sebagai penerapan *corporate governance*.

Kajian Literatur

Teori Keagenan

Menurut Alam & Fidiana (2019), teori keagenan atau teori agensi menguraikan keterkaitan yang terjadi antar pihak agen dan pihak prinsipal yang mana agent sebagai pengelola atau pemilik dan eksekutif perusahaan dengan cara hukum berkewajiban satu sama lain berdasarkan ketentuan kontrak. Agent bertugas mengambil keputusan dan menjalankan manajemen dan prinsipal bertugas melakukan penilaian atau pertimbangan atas sebuah informasi. Teori keagenan menyatakan bahwa akan muncul permasalahan agensi jika terdapat pemisahan antara manajer yang bertindak sebagai agen yang menjalankan perusahaan dan pemilik yang bertindak sebagai prinsipal. Hal tersebut akan terjadi karena antar pihak tersebut selalu saling berusaha dengan tujuan memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Teori agensi sendiri erat keterkaitan yang terjadi nya dengan tindakan tax avoidance karena teori agensi menjelaskan keterkaitan yang terjadi antara manajemen perusahaan dan stakeholder, yang mana kedua pihak saling bekerja sama untuk menghasilkan laba perusahaan. Akan tetapi sering terjadi konflik antara manajemen dan stakeholder dikarenakan perbedaan tujuan. Pihak pemilik perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin sehingga meminta pihak manajemen melakukan tindakan tax avoidance guna memperkecil jumlah pembayaran pajak lain halnya pihak manajemen tidak ingin melakukan tindakan tersebut karena memiliki resiko untuk terlibat dalam masalah hukum.

Tax Avoidance

Tax avoidance mampu mengartikan kegiatan atau tindakan yang diindikasikan oleh badan usaha dengan maksud untuk mengurangi kewajiban perpajakannya yang dianggap sah oleh pemerintah dan aman diindikasikan oleh Wajib Pajak karena masih menaati peraturan atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Memanfaatkan celah atau kelemahan aturan hukum perpajakan untuk meminimalisir jumlah pajak yang tentunya wajib diindikasikan pembayaran merupakan cara yang umum diindikasikan dalam penghindaran pajak (Ariawan & Setiawan, 2017).

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh para pemegang saham yang tentunya menginginkan adanya pendapatan atau pengembalian yang berlipat ganda dari apa yang di investasikan ke perusahaan. Dengan mengurangi jumlah beban pajak berarti meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Penghindaran pajak tidak berarti bebas biaya, biaya yang harus ditanggung saat melakukan kegiatan penghindaran pajak yaitu perlu mengorbankan waktu dan tenaga serta adanya risiko apabila sampai terungkapnya tindakan penghindaran pajak. Resiko yang akan disetujui mulai dari denda dan bunga, hilangnya reputasi perusahaan yang mana akan berdampak buruk bagi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Dewan Komisaris Independen

Komisaris yang tentu tidak ada keterkaitan secara langsung dengan perseroan dapat diartikan sebagai komisaris independen. Seorang komisaris yang tidak memihak wajib memenuhi persyaratan nomor Ketetapan OJK. 33/POJK 04/2014. Mengelola dan mengawasi bisnis untuk menjamin kepatuhan atas keseluruhan hukum beserta ketetapan yang berlaku, komisaris

independen memainkan peran penting. Untuk menghindari pelanggaran aturan dan peraturan, komisaris independen bekerja sebagai perantara antara pemilik bisnis dan manajemen saat membuat pilihan tentang kebijakan dan pajak. Persyaratan untuk menjadi dewan komisaris independen adalah tidak terafiliasi dengan komisaris lain dan bukan karyawan dari perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 bulan sebelum waktu pemilihan anggota dewan (Kho, 2020).

Kepemilikan Institusional

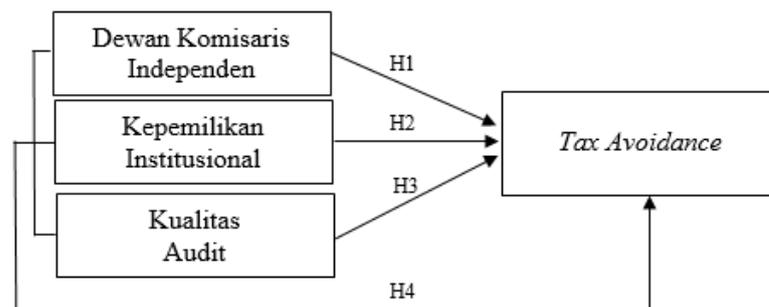
Kepemilikan institusional mampu mengartikan suatu investor asing, pemerintah, penyedia asuransi, dan bank semuanya memiliki saham di perusahaan yang diatur lebih ketat oleh lembaga-lembaga ini. Peningkatan pemantauan kinerja manajemen dapat dicapai dengan adanya kepemilikan institusional dalam suatu korporasi. Semakin berharga sebuah perusahaan sebagai investasi, maka akan lebih tinggi sistem monitoring atau pengawasan dalam perusahaan tersebut (Nur & Subardjo, 2020).

Kualitas Audit

Menurut temuan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengacu atas No. Per/05/M.Pan/03/2008, kualitas audit mampu mengartikan auditor yang berhasil menyelesaikan tugas pokok dan tanggung jawabnya, termasuk membuat kertas kerja audit, mengatur, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan efisiensi tindak lanjutnya audit, serta koherensi laporan audit. Jika audit diindikasikan dengan memakai tahapan metode audit yang tepat, maka dianggap berkualitas tinggi. Kecakapan auditor dalam mengaudit laporan itu sendiri membantu peningkatan kualitas audit.

Kualitas audit merupakan potensi atau kemungkinan pelanggaran sistem akuntansi akan ditemukan dan dilaporkan oleh auditor. Kapasitas auditor untuk memeriksa dan mengungkap ketidakakuratan utama dalam laporan keuangan perusahaan adalah fungsi dari kompetensi mereka, tetapi motivasi mereka untuk mengungkapkan ketidakakuratan tersebut adalah fungsi dari independensi profesionalnya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis riset ialah solusi atau hasil dari prosedur logis sementara untuk masalah yang dirumuskan studi masih harus diteliti keakuratannya memakai data penelitian empiris (Djaali, 2020). Berikut hipotesis yang akan digunakan:

- H1: Dewan komisaris independen memberi efek yang signifikan atas *tax avoidance* mengacu atas entitas terlisting di BEI mengacu atas sektor property serta *real estate*.
- H2: Kepemilikan institusional memberi efek yang signifikan atas *tax avoidance* mengacu atas entitas terlisting di BEI mengacu atas sektor property serta *real estate*.
- H3: Kualitas audit memberi efek yang signifikan atas *tax avoidance* mengacu atas entitas terlisting di BEI mengacu atas sektor property serta *real estate*.
- H4: Dewan komisaris independen, kepemilikan institusional beserta kualitas audit dengan cara simultan memberi efek yang signifikan atas *tax avoidance* mengacu atas entitas terlisting di BEI mengacu atas sektor property serta *real estate*.

Metode

Dalam riset ini, teknik kuantitatiflah yang diterapkan. Pendekatan riset kuantitatif berarti penelitian yang menganalisis teori-teori yang terdapat dalam variabel penelitian dengan memakai aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan data berupa angka maupun statistik. Menurut Djaali (2020), pengertian penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang mengambil kesimpulan dengan cara statistika berdasarkan hasil uji hipotesis dengan melakukan pengukuran atas data empiris hasil pengumpulan data. Pendekatan ini berfungsi untuk mencari tahu apakah terdapat keterkaitan yang terjadi antara variabel satu diperbandingkan variabel lainnya.

Sumber Data

Data sekunder yang mampu dipakai dalam riset ini mengacu pada informasi yang telah diinterpretasikan pengumpulan dan diinterpretasikan pembukuan oleh pihak lain, seperti bagan organisasi, catatan penjualan, dan jumlah persediaan, dan diperoleh peneliti melalui media perantara. Laporan tahunan perusahaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor properti serta real estate diperlukan untuk riset ini.

Populasi dan Sampel

Menurut Djaali (2020), populasi mempunyai arti keseluruhan dari unit penelitian yang akan dipelajari atau diselidiki karakteristiknya. Populasi yang diambil untuk riset ini ialah keseluruhan entitas yang terlisting di BEI yang mengacu atas sektor properti serta real estate.

Menurut Sugiyono (2018), sampel merupakan komponen kualitas populasi dan sejauh mana mereka memilikinya. Riset ini mampu mempergunakan strategi purposive sampling, yang didefinisikan sebagai teknik pemilihan subset dari populasi untuk riset di mana peneliti memilih peserta dengan cara acak berdasarkan kesesuaian mereka untuk penelitian daripada dengan cara acak (Poniman & Banjarnahor, 2022).

Tabel 2. Teknik Penyeleksian Sampel

No	Kriteria	Jumlah Entitas
1	Entitas yang terlisting di BEI di sektor properti dan real estate	87
2	Entitas di sektor properti beserta <i>real estate</i> yang tidaklah konsisten terlisting di BEI periode 2018-2022.	(37)
3	Entitas di sektor properti beserta <i>real estate</i> yang mengalami delisting dalam tahun 2018-2022.	(7)
4	Entitas di sektor properti beserta <i>real estate</i> yang tidak menerbitkan laporan tahunan selama kurun waktu pengamatan yaitu tahun 2018-2022.	(5)
5	Entitas di sektor properti beserta <i>real estate</i> yang terjadilah kerugian selama periode 2018-2022.	(24)
6	Entitas di industri properti beserta <i>real estate</i> yang memberikan informasi tentang regulator yang tidak memihak, kepemilikan institusional, dan standar audit.	0
	Jumlah Sampel	14
	Tahun Pengamatan	5
	Jumlah Pengamatan	70

Berikut daftar 14 perusahaan yang merupakan hasil yang diperoleh atas teknik yang mengacu atas pengambilan sampel yang bersifat purposive sampling:

Tabel 3. Sampel Entitas di sektor Properti dan *Real Estate*

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CTRA	PT Ciputra Development Tbk
2	BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk
3	DMAS	PT Puradelta Lestari Tbk
4	GRPA	PT Perdana Gapuraprima Tbk
5	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk
6	KIJA	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
7	MTLA	PT Metropolitan Lan Tbk
8	PPRO	PT PP Properti Tbk
9	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk
10	RDTX	PT Roda Vivatex Tbk
11	SMRA	PT Summarecon Agung Tbk
12	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk
13	MKPI	PT Metropolitan Kentjana Tbk
14	RODA	PT Pikko Land Development Tbk

Sumber: Data yang diolah (2023)

Operasional Variabel Penelitian

a. Tax Avoidance

Beberapa metrik, seperti CuETR, CETR, kemudian ETR, dapat digunakan untuk menilai penghindaran pajak. Dalam analisis ini, kami memakai ETR sebagai pengganti penggelapan pajak. dengan rumus berikut ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

b. Dewan Komisaris Independen

Berikut rumus perhitungan dewan komisaris independen:

$$PDKI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total dewan komisaris}}$$

c. Kepemilikan Institusional

Berikut rumus perhitungan kepemilikan institusional:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

d. Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit diindikasikan dengan variabel dummy yaitu dengan skor paling rendah 0 dan nilai paling tinggi 1. Perusahaan yang diindikasikan pengauditan oleh bagian KAP empat besar (*The Big4*) dilambangkan dengan skor 1 yang mana menurut beberapa literatur KAP *Big4* tentunya mampu memberi hasil audit yang memiliki kualitas lebih baik dibanding KAP kecil karena diduga tingkat kecurangannya lebih minim, lain halnya perusahaan yang dilakukan pengauditan oleh bagian non *The Big Four* dilambangkan nilai 0 (Kartana & Wulandari, 2018).

Teknik Analisis Data

Metode pengolahan data dalam riset ini adalah dengan memakai metode analisis statistik. Tujuan dari analisis statistik yaitu agar dapat menentukan kondisi bagaimana hipotesis dapat digunakan dalam melakukan suatu hal, mempersiapkan model mengenai nilai yang belum diketahui berdasarkan data yang diteliti dan mempersiapkan model mengenai dampak dari hipotesis yang akan disetujui dan kemudian digunakan untuk menjadi dasar dalam mengambil dan menghasilkan keputusan. Program aplikasi yang peneliti gunakan untuk mengolah data yaitu SPSS versi 26 memakai banyak metode untuk menganalisis variabel, seperti statistik deskriptif, uji asumsi tradisional.

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			Std. Deviation
		Minimum	Maximum	Mean	
X1_DKI	70	.250	.667	.38599	.107985
X2_KI	70	.093	.823	.59917	.219440
X3_KA	70	0	1	.36	.483
Y_TA	70	.000	.949	.05121	.121913
Valid N (listwise)	70				

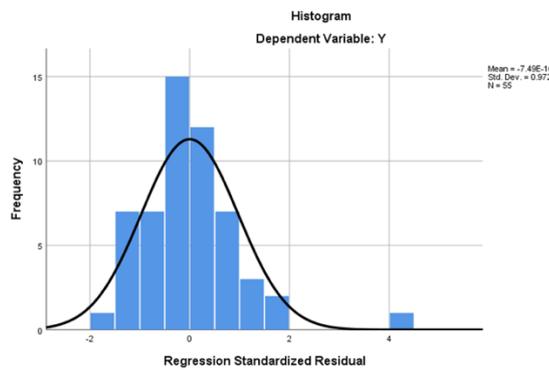
Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Simbol N mengacu atas tabel 4 menunjukkan kuantitas data atau jumlah sampel yang dianalisis, dalam hal ini 70 record bersumber laporan tahunan entitas yang diperdagangkan di BEI mengacu pada sektor property serta *real estate* untuk tahun 2018 sampai dengan 2022.

Sebagaimana dapat dilihat mengacu atas tabel di atas, data dewan komisaris independen untuk entitas yang *terlisting* di BEI mengacu pada sektor property serta *real estate* berkisar antara terendah 0,25 hingga tertinggi 0,667, yang ditentukan oleh uji statistik deskriptif. Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat diberi suatu kesimpulan bahwa komisaris independen memiliki skor rata-rata 0,38599 selanjutnya standar deviasi 0,107985.

Untuk periode 2018-2022, nilai terendah untuk data kepemilikan institusional untuk bisnis yang *terlisting* di BEI mengacu pada sektor property serta real estate adalah 0,093, dan skor tertinggi adalah 0,823. Nilai mean (rata-rata) dari data kepemilikan institusional sebelumnya adalah 0,59917, lain halnya standar deviasinya ialah 0,219940. Entitas yang *terlisting* di BEI di sektor properti dan real estate mampu memberi skor kualitas audit antara 0 dan 1 antara tahun 2018 dan 2022. Skor rata-rata yang dihitung ialah 0,36, dibandingkan standar deviasinya adalah 0,483. Untuk periode 2018-2022, perusahaan yang *terlisting* di BEI pada di sektor properti dan real estate mencapai skor berkisar antara 0,00 hingga 0,949 dalam statistik penghindaran pajak. Nilai mean (rata-rata) yang dihitung dari data penghindaran pajak ialah 0,05121, dengan standar deviasi 0,121913.

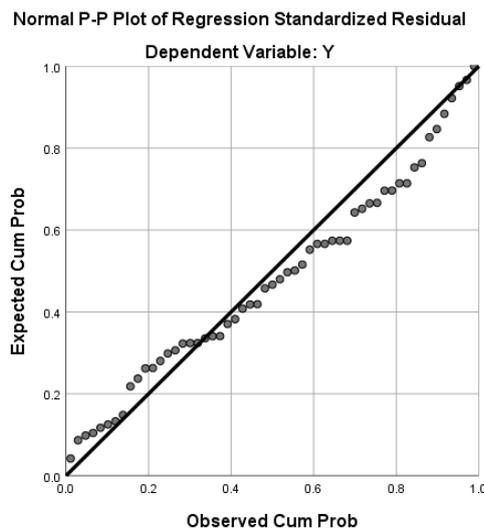
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 2. Diagram Histogram

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Gambar 2 memperlihatkan output dari uji normalitas yang mana menggambarkan informasi yang terdistribusi dengan cara normal atau dapat dikatakan bahwa variabel dengan cara keseluruhan telah mencapai ketentuan sebagai analisis dengan memanfaatkan metode regresi linear berganda.



Gambar 3. Diagram Normal P-P Plot

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Diagram Normal P-P Plot yaitu temuan uji normalitas pada riset ini diturunkan dari output kedua. Model ini memiliki distribusi normal, seperti yang dijelaskan oleh titik-titik di sekitar garis yang ditarik dari satu sudut ke sudut yang berlawanan satu sama lain.

Tabel 5. Hasil Uji Data One-Sample Kolmogorov Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
	<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>N</i>		55
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	.03031160
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.117
	<i>Positive</i>	.117
	<i>Negative</i>	-.074
<i>Test Statistic</i>		.117
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.059 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Output uji *One-Sample* KS mengacu atas tabel 5 diatas memberikan value *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan skor 0,059 yang mana nilai tersebut merupakan lebih tinggi dari 0,05 maka penyebaran informasi disimpulkan wajar atau normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

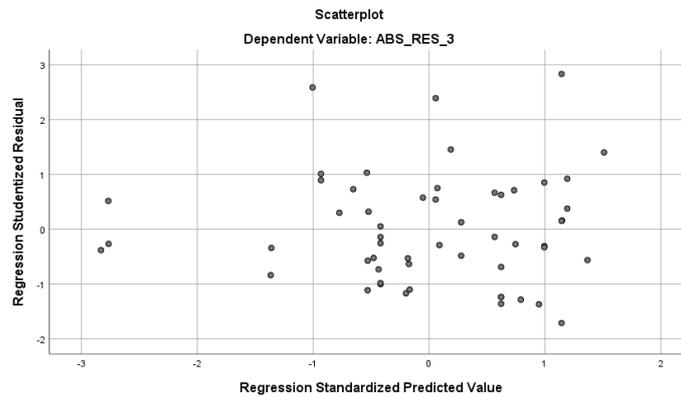
<i>Model</i>	<i>Coefficients^a</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
X1_DKI	.938	1.066
X2_KI	.917	1.091
X3_KA	.966	1.035

a. Dependent Variable: Y_TA

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Pada output uji multikolinearitas diatas terdapat kolom *Collinearity Statistics* yang mana terbagi menjadi 2 yaitu kolom untuk skor tolerance kemudian skor VIF permasing-masing variabel terikat. Skor tolerance dari variabel komisaris independen yaitu dengan skor 0,938, kepemilikan institusional 0,917 dan kualitas audit adalah 0,966 yang mana seluruh variabel independen mampu memberi skor tolerance yang lebih tinggi dari 0,1. Sementara untuk skor VIF dari variabel komisaris independen dengan skor 1,066, kepemilikan institusional 1,091 dan kualitas audit adalah 1,035 yang mana seluruh variabel independen menghasilkan skor VIF kurang atau lebih rendah dari 10. Maka disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas karena skor dari output yang dihasilkan tidak mengurangi atau melebihi batas yang telah ditentukan.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4. Hasil Uji Scatterplot

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Gambar 4 mengindikasikan titik data grafik yang terjadi penyebaran yang bersifat dengan acak di atas serta di bawah sumbu 0 Y, membentuk sebar. Oleh sebab itu, model yang mengacu atas suatu regresi ini bersifat homoskedastik. Untuk lebih memastikan apakah terdapat atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dipastikan dari hasil uji glejser yang mana bila skor signifikan $> 0,05$ maka dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan jika skor signifikansi yang tentu kuranglah dari $0,05$ maka sebaliknya dinyatakan didapati terjadilah heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Glejser

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficient	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.015	.411		.037	.970
	X1_DKI	.927	.673	.191	1.377	.174
	X2_KI	.439	.385	.160	1.142	.259
	X3_KA	.231	.153	.205	1.506	.138

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Mengacu atas tabel 7 dideskripsikan tidak ada bukti heteroskedastisitas mengacu atas model atas suatu regresi, sebab keseluruhan variabel independen mampu memberi skor signifikan $> 0,05$ (dewan komisaris independen $0,174$, kepemilikan institusional $0,259$, kemudian kualitas audit $0,138$).

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Durbin-Watson

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.794 ^a	.630	.608	.03026	1.848

a. Predictors: (Constant), X3_KA, X1_DKI, X2_KI
b. Dependent Variable: Y_TA

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Menurut tabel DW, tingkat signifikansi $0,05$ sesuai dengan skor $1,6815$, di mana k ialah jumlah yang mencakup semua variabel independen kemudian n ialah jumlah yang mencakup semua observasi, dalam hal ini 55 . Kolom DW Tabel 8 menghasilkan skor output

1,848 , yang lebih besarlah dari skor du tetapi lebih kecillah dari skor 4 - du, membuat orang menyimpulkan bahwa tidak terjadilah autokorelasi yang mampu memberi sifat tentunya positif maupun negatif mengacu atas model yang mencakup atas suatu regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.176	.020			8.693	.000
	X1 DKI	-.095	.041	-.204		-2.305	.025
	X2 KI	-.198	.024	-.726		-8.129	.000
	X3 KA	-.045	.008	-.464		-5.345	.000

a. Dependent Variable: Y TA

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2022

Didasarkan tabel 9, dpaat dihasilkan persamaan regresi linear berganda antara lain yaitu:

$$Y = 0,176 - 0,095X_1 - 0,198X_2 - 0,045X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi linear berganda tersebut dapat diberi suatu kesimpulan:

- Skor konstanta dengan skor 0,176 mampu mengartikan apabila tidak terdapat variabel dewan komisaris independen, kepemilikan insttusional dan kualitas audit, maka tax avoidance perusahaan dengan skor 0,176.
- Skor koefisien β_1 untuk dewan komisaris independen dengan skor -0,095 mampu mengartikan apabila variabel dewan komisaris independen mengalami peningkatan 1 satuan tetapi variabel lainnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, maka akan mengakibatkan penurunan pada tax avoidance dengan skor -0,095.
- Skor koefisien β_2 untuk kepemilikan institusional dengan skor -0,198 mampu mengartikan jika variabel kepemilikan institusional mengalami peningkatan 1 satuan tetapi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka akan mengakibatkan kenaikan pada tax avoidance sebanyak -0,198.
- Skor koefisien β_3 untuk kualitas audit dengan jumlah -0,045 mampu mengartikan jika variabel kualitas audit mengalami peningkatan 1 satuan tetapi variabel lain tidak mengalami perubahan, maka akan mengakibatkan penurunan pada tax avoidance dengan skor -0,045.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.176	.020			8.693	.000
	X1 DKI	-.095	.041	-.204		-2.305	.025
	X2 KI	-.198	.024	-.726		-8.129	.000
	X3 KA	-.045	.008	-.464		-5.345	.000

a. Dependent Variable: Y TA

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2023

Berdasarkan t tabel dengan signifikansi 0,05 dengan $df = n-k-1$ atau $55-3-1 = 51$ adalah dengan skor 2,00758. Mengacu atas tabel 10, hasil uji t dapat dideskripsikan:

- Variabel dewan komisaris independen (X1) mampu memberi skor t-hitung berskor -2,305 > t-tabel -2,00758 dan skor signifikan berskor 0,025 < 0,05, maka kesimpulannya H_0 tidak

disetujui H_a disetujui sehingga variabel Dewan Komisaris Independen memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan *real estate* periode tahun 2018-2022. Hasil riset ini semulus dengan riset dari Alam & Fidiana (2019), Ariawan & Setiawan (2017) serta Purwanti & Jaya (2020) yang menginterpretasikan bahwa Dewan Komisaris Independen memberi efek yang atas *Tax Avoidance*, akan tetapi tidak semulus dengan riset yang diinterpretasikan oleh Nur & Subardjo (2020), Kartana & Wulandari (2018), Yuniarwati et al. (2017) serta Triyanti et al. (2020) yang menghasilkan Dewan Komisaris Independen tidak memberi efek yang atas *Tax Avoidance*.

- b. Variabel kepemilikan institusional (X2) mampu memberi skor t-hitung $-8,129 > t\text{-tabel} -2,00758$ dan skor signifikan $0,000 < 0,05$, maka diberi suatu kesimpulan H_0 tidak disetujui H_a disetujui sehingga variabel Kepemilikan Institusional memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan *real estate* periode tahun 2018-2022. Hasil riset ini semulus dengan Nur & Subardjo (2020), Purwanti & Jaya (2020), Ariawan & Setiawan (2017) serta Darsani & Sukartha (2021) yang menginterpretasikan bahwa Kepemilikan Institusional memberi efek yang atas *Tax Avoidance*, namun tidak semulus dengan Sari & Kinasih (2021) serta Kartana & Wulandari (2018) yang menginterpretasikan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memberi efek yang atas *Tax Avoidance*.
- c. Variabel kualitas audit (X3) memperoleh skor t-hitung $-5,345 > t\text{-tabel} -2,00758$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka diberi kesimpulan H_0 tidak disetujui H_a disetujui sehingga variabel Kualitas Audit memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan *real estate* tahun 2018-2022. Hasil riset ini searah dengan Zobar & Miftah (2020) serta Kusnadi & Pandoyo (2022) yang memperoleh hasil penelitian variabel Kualitas Audit memberi efek yang signifikan atas *Tax Avoidance*, namun riset ini tidak semulus dengan riset yang diinterpretasikan oleh Yuniarwati et al. (2017) serta Kartana & Wulandari (2018) yang membuktikan Kualitas Audit tidak memberi efek yang atas *Tax Avoidance*.

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	ANOVA ^a		F	Sig.
		df	Mean Square		
1 Regression	.078	3	.026	28.435	.000 ^b
Residual	.046	50	.001		
Total	.124	53			

^a. Dependent Variable: Y TA
^b. Predictors: (Constant), X3 KA, X1 DKI, X2 KI

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2022

Diketahui $df_1 = k-1$ atau $4-1 = 3$ serta $df_2 = n-k-1$ ataupun $55-4 = 51$ sehingga F-tabel akan memperoleh skor 2,79. Adapun kriteria pada saat melakukan uji F yaitu variabel bebas dinyatakan memberi efek dan signifikan dengan cara simultan atas variabel dependen jika F-hitung $> F\text{-tabel}$ dan skor signifikan lebih rendah 0,05, berlaku sebaliknya. Mengacu atas tabel 11 terlihat F-hitung $28,435 > 2,79$ dan skor signifikan $0,000 < 0,05$, dengan arti H_0 tidak disetujui H_a disetujui, maka diberi kesimpulan variabel Dewan Komisaris Independen, variabel Kepemilikan Institusional dan variabel Kualitas Audit dengan cara simultan memberi efek atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan *real estate* periode tahun 2018-2022. Hasil riset ini berbanding terbalik dengan riset

Kartana & Wulandari (2018) yang mengintrepretasikan bahwa Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional beserta Kualitas Audit dengan cara simultan tidak memberi efek yang signifikan atas *Tax Avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	
1	.794 ^a	.630	.608	.03026	

a. Predictors: (Constant), X3_KA, X1_DKI, X2_KI
b. Dependent Variable: Y_TA

Sumber: Pengolahan Data SPSS 26, 2022

Tabel 12 mencatat skor koefisien determinasi kolom Adjusted R-Square dengan skor 0,608 atau 60,8% jika dikonversikan ke dalam persentase mengintrepretasikan bahwa variabel keseluruhan variabel independen mampu menggambarkan variabel penghindaran pajak dengan skor 60,8%; sisanya dengan skor 39,2% dipengaruhi oleh variabel yang berbeda di luar cakupan riset ini.

Kesimpulan

Mengacu atas berbagai hasil uji dan analisis yang dipaparkan diatas, maka berikut merupakan penjelasan mengenai hasil dari pengujian hipotesis antara lain: dewan Komisaris Independen dengan cara parsial memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan real estate Periode 2018-2022; Kepemilikan Institusional dengan cara parsial memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan real estate Periode 2018-2022; Kualitas Audit dengan cara parsial memberi efek yang negatif signifikan atas *Tax Avoidance* pada entitas yang terlisting di Bursa Efek Indonesia yang mengacu pada sektor properti dan real estate Periode 2018-2022; Penghindaran Pajak pada bisnis di sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dengan cara signifikan dipengaruhi oleh keseluruhan variabel independen dengan cara bersamaan.

Saran

Mengacu atas kesimpulan yang sudah dirangkum, maka berikut merupakan saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya: riset ini hanya memanfaatkan data periode 2018-2022, sehingga disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak ataupun memperluas periode penelitian agar dapat menganalisis lebih jelas kondisi perusahaan dari tahun tertentu hingga jangka panjang; disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk menambahkan serta memperbanyak variabel yang memberi efek, gunakan variabel yang dapat disensor oleh aplikasi olah data dan gunakan metode analisis untuk menarik kesimpulan.

Daftar Pustaka

- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen,

- Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13–22.
- Djaali. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (B. S. Fatmawati (ed.)). Bumi Aksara.
- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perus-Ahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Halaman Laporan Kinerja DJP*. Direktorat Jenderal Pajak. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>
- Kho, S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In *Universitas Putera Batam*.
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (EMBISS)*, 2(2), 257–263. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/91>
- Negara, M. N. P. A. (2008). *Menteri negara pendayagunaan aparatur negara*.
- Nur, M., & Subardjo, A. (2020). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–21.
- Poniman, & Banjarnahor, H. (2022). *Pengaruh Capital Adequacy (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), BOPO, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank yang Listing di BEI 2016-2020* (pp. 1–31).
- Purwanti, R., & Jaya, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Measurement Jurnal Akuntansi Universitas Riau Kepulauan Batam*, 14(2), 9–15. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i2.2868>
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1), 51–61. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta.
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Yuniarwati, Ardana, I. C., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Chinese Business Review*, 16(10), 510–517. <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>